



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 64/PMK.02/ 2008

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004](#) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan/atau lintas wilayah.

Pasal 2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

### STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2009

	Hal
1. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1
2. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa	2
3. Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Per Paket	2
4. Pengelola PNBP	3
5. Pelaksana Kegiatan Peneliti	3
6. Narasumber Dalam Rangka Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi Untuk Kegiatan Inter Departemen	3
7. Penyuluh Non PNS	3
8. Pengemudi, Pramubakti, Satpam dan <i>Cleaning Service</i>	3
9. Tim Pelaksana Kegiatan	3
10. Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat	4
11. Tim Penyusunan Jurnal	4
12. Tim Penyusunan Buletin/Majalah	4
13. Pengelola Satker Yang Hanya Mengelola Gaji	4
14. Vakasi Penyelenggaraan Ujian	5
15. Instruktur	5
16. Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur	5
17. Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	5
18. Penggantian Inventaris Lama Dan Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru	5
19. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5
20. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	6
21. Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai (Termasuk Atribut Dan Ongkos Jahit)	6
22. Pakaian Mahasiswa/Taruna (Termasuk Atribut Dan Ongkos Jahit)	6
23. Pakaian Dinas Dokter/Perawat (Termasuk Atribut Dan Ongkos	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jahit)	6
24. Pakaian Sopir/Pesuruh (Termasuk Atribut Dan Ongkos Jahit)	6
25. Pakaian Satpam (Termasuk Perlengkapan)	6
26. Toga Hakim (Belum Termasuk Perlengkapan)	6
27. Toga Mahasiswa (Termasuk Atribut)	6
28. Konsumsi Rapat	6
29. Penerjemahan Dan Pengetikan	6
30. Pencetakan	6
31. Penjilidan	7
32. Pengadaan Kendaraan Dinas	7
33. Diklat Pimpinan/Struktural	7
34. Latihan Prajabatan	7
35. Diklat Teknis/Fungsional PNS	8
36. Diklat Ketrampilan Untuk Masyarakat (Non Institusional)	8
37. Pengadaan Bahan Makanan	8
38. Pemeliharaan Gedung	8
39. Pemeliharaan Dan Biaya Operasional Sarana Kantor	8
40. Sewa Kendaraan Dan Mesin Fotokopi	9
41. Standar Biaya Sewa Ruang Rapat Dan Gedung Pertemuan Per Hari	10
42. Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11
43. Perjalanan Dinas Luar Negeri	13
44. Tarif Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Untuk Lokasi Di Luar Kantor Per Orang Per Hari	19
45. Tunjangan Tugas Belajar Beasiswa Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri	20
46. Kegiatan-Kegiatan Berskala Internasional	22
47. Indeks Konsumsi Kegiatan Di Luar Kantor	23
48. Penjelasan Lampiran Standar Biaya Umum 2009	24

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIASTANDAR BIAYA UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2009

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<b>PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
	<b>1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	220,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	330,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	385,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	440,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	495,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	550,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	605,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	715,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	880,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	1,100,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	1,320,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,650,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,980,000	
	<b>1.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	190,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	280,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	330,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	385,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	440,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	495,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	550,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	660,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	770,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	935,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	1,155,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,430,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,760,000	
	<b>1.3. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN &amp; PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	165,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	250,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	305,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	330,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	385,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	440,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	470,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	550,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	770,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	825,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	990,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,265,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,485,000	
	<b>1.4. BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA (PUM)</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	155,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	230,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	275,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	310,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	350,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar sd. Rp. 2,5 milyar	OB	385,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	440,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	525,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	660,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	770,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd. Rp. 500 miliar	OB	935,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,155,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,430,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>1.5. STAF PENGELOLA</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	110,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	165,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	195,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	220,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	250,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	275,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	305,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	360,000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	440,000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	550,000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	660,000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	825,000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	990,000	
<b>2</b>	<b>PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
	<b>2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</b>	OB	165,000	
	<b>2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	330,000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	OP	495,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	OP	580,000	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	660,000	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	745,000	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	825,000	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	910,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	1,075,000	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	1,320,000	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	1,650,000	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	1,980,000	
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	2,475,000	
	<b>2.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	250,000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	OP	310,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	OP	430,000	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	495,000	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	550,000	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	605,000	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	680,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	800,000	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	990,000	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	1,240,000	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	1,485,000	
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	1,855,000	
	<b>2.4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	220,000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 juta sd. Rp.200 juta	OP	310,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta sd. Rp.500 juta	OP	430,000	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	495,000	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	550,000	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	605,000	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	680,000	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	800,000	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	880,000	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	990,000	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	1,320,000	
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	1,855,000	
<b>3</b>	<b>PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA PER PAKET</b>			
	3.1. Pengadaan barang Rp 50 juta sd. Rp.500 juta atau Jasa konsultan Rp. 50 juta sd. 200 juta	OP	220,000	
	3.2. Pengadaan barang diatas Rp. 500 juta atau Jasa konsultan diatas Rp. 200 juta	OP	330,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	<b>PENGELOLA PNBP</b>			
	<b>4.1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA</b>			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta	OB	495,000	
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	605,000	
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	660,000	
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	770,000	
	e. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 5 miliar	OB	880,000	
	<b>4.2. BENDAHARA</b>			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta	OB	330,000	
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	440,000	
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	550,000	
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	660,000	
	e. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 5 miliar	OB	770,000	
	<b>4.3. SEKRETARIAT / ANGGOTA</b> Sekretariat/ Anggota , maksimum 5 orang	OB	220,000	
5	<b>PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN</b>			
	5.1 Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	27,500	
	5.2 Peneliti (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	22,500	
	5.3 Pembantu Peneliti	OJ	15,000	
	5.4 Pengolah Data	Penelitian	1,000,000	
	5.5 Petugas Survey	OR	5,000	
	5.6 Pembantu Lapangan	OH	50,000	
	5.7 Koordinator Peneliti	OB	350,000	
	5.8 Sekretariat Penelitian	OB	250,000	
6	<b>NARA SUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DESIMINASI UNTUK KEGIATAN INTERN DEP.</b>			
	6.1 Menteri / pejabat setingkat Menteri	OJ	1,200,000	
	6.2 Pejabat Eselon I	OJ	1,000,000	
	6.3 Pejabat Eselon II	OJ	750,000	
	6.4 Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	600,000	
	6.5 Moderator	OJ	500,000	
	6.6 Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	OJ	1,000,000	
7	<b>PENYULUH NON PNS</b>			
	7.1 SLTA	OB	1,150,000	
	7.2 SARJANA MUDA	OB	1,300,000	
	7.3 SARJANA	OB	1,450,000	
	7.4 MASTER (S.2)	OB	1,600,000	
8	<b>PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM &amp; CLEANING SERVICE</b>	OB	1,000,000	
9	<b>TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
	<b>9.1. Yang Ditetapkan Atas Dasar Peraturan Presiden</b>			
	a. Pengarah	OB	2,500,000	
	b. Penanggung jawab	OB	2,000,000	
	c. Koordinator	OB	1,000,000	
	d. Ketua	OB	850,000	
	e. Wakil Ketua	OB	750,000	
	f. Sekretaris	OB	600,000	
	g. Anggota	OB	500,000	
	<b>9.2. Yang Ditetapkan Atas Dasar Peraturan Menteri</b>			
	a. Pengarah	OB	1,500,000	
	b. Penanggung jawab	OB	1,000,000	
	c. Koordinator	OB	750,000	
	d. Ketua	OB	650,000	
	e. Wakil Ketua	OB	500,000	
	f. Sekretaris	OB	350,000	
	g. Anggota	OB	300,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>9.3. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Eselon I</b>			
	a. Pengarah	OB	750,000	
	b. Penanggung jawab	OB	600,000	
	c. Koordinator	OB	500,000	
	d. Ketua	OB	450,000	
	e. Wakil Ketua	OB	400,000	
	f. Sekretaris	OB	300,000	
	g. Anggota	OB	250,000	
	<b>9.4. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan KPA</b>			
	a. Pengarah	OB	500,000	
	b. Penanggung jawab	OB	400,000	
	c. Koordinator	OB	300,000	
	d. Ketua	OB	275,000	
	e. Wakil Ketua	OB	250,000	
	f. Sekretaris	OB	200,000	
	g. Anggota	OB	150,000	
<b>10</b>	<b>TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT</b>			
	10.1 Penanggung jawab / Pembina	OK	400,000	
	10.2 Ketua / wakil ketua	OK	300,000	
	10.3 Sekretaris	OK	250,000	
	10.4 Anggota	OK	200,000	
<b>11</b>	<b>TIM PENYUSUNAN JURNAL</b>			
	11.1 Penanggung jawab	OTer	400,000	
	11.2 Redaktur	OTer	300,000	
	11.3 Penyunting/Editor	OTer	250,000	
	11.4 Redaktur Pelaksana	OTer	200,000	
	11.5 Desain grafis & Fotografer	OTer	175,000	
	11.6 Sekretariat	OTer	150,000	
	11.7 Pembuat artikel	Halaman	75,000	
<b>12</b>	<b>TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH</b>			
	12.1 Penanggung jawab	OTer	300,000	
	12.2 Redaktur	OTer	250,000	
	12.3 Penyunting/Editor	OTer	200,000	
	12.4 Desain grafis & Fotografer	OTer	175,000	
	12.5 Redaktur Pelaksana	OTer	150,000	
	12.6 Sekretariat	OTer	100,000	
	12.7 Pembuat artikel	Halaman	50,000	
<b>13</b>	<b>PENGELOLA SATKER YANG HANYA MENGELOLA GAJI</b>			
	<b>13.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/ KPA</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	135,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	190,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	250,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	300,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 miliar	OB	355,000	
	<b>13.2 PEMEGANG KAS/ BENDAHARA</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	110,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	165,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	220,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	275,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 miliar	OB	330,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>9.3. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Eselon I</b>			
	a. Pengarah	OB	750,000	
	b. Penanggung jawab	OB	600,000	
	c. Koordinator	OB	500,000	
	d. Ketua	OB	450,000	
	e. Wakil Ketua	OB	400,000	
	f. Sekretaris	OB	300,000	
	g. Anggota	OB	250,000	
	<b>9.4. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan KPA</b>			
	a. Pengarah	OB	500,000	
	b. Penanggung jawab	OB	400,000	
	c. Koordinator	OB	300,000	
	d. Ketua	OB	275,000	
	e. Wakil Ketua	OB	250,000	
	f. Sekretaris	OB	200,000	
	g. Anggota	OB	150,000	
<b>10</b>	<b>TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT</b>			
	10.1 Penanggung jawab / Pembina	OK	400,000	
	10.2 Ketua / wakil ketua	OK	300,000	
	10.3 Sekretaris	OK	250,000	
	10.4 Anggota	OK	200,000	
<b>11</b>	<b>TIM PENYUSUNAN JURNAL</b>			
	11.1 Penanggung jawab	OTer	400,000	
	11.2 Redaktur	OTer	300,000	
	11.3 Penyunting/Editor	OTer	250,000	
	11.4 Redaktur Pelaksana	OTer	200,000	
	11.5 Desain grafis & Fotografer	OTer	175,000	
	11.6 Sekretariat	OTer	150,000	
	11.7 Pembuat artikel	Halaman	75,000	
<b>12</b>	<b>TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH</b>			
	12.1 Penanggung jawab	OTer	300,000	
	12.2 Redaktur	OTer	250,000	
	12.3 Penyunting/Editor	OTer	200,000	
	12.4 Desain grafis & Fotografer	OTer	175,000	
	12.5 Redaktur Pelaksana	OTer	150,000	
	12.6 Sekretariat	OTer	100,000	
	12.7 Pembuat artikel	Halaman	50,000	
<b>13</b>	<b>PENGELOLA SATKER YANG HANYA MENGELOLA GAJI</b>			
	<b>13.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/ KPA</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	135,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	190,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	250,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	300,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 miliar	OB	355,000	
	<b>13.2 PEMEGANG KAS/ BENDAHARA</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	110,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	165,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	220,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	275,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 miliar	OB	330,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13.3	<b>JURU BAYAR/ STAF</b> a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar c. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar d. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 miliar	OB OB OB OB OB	85,000 135,000 190,000 250,000 300,000	
14	<b>VAKASI PENYELENGGARA UJIAN</b>			
14.1	<b>Setingkat Pendidikan Dasar</b> a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b. Pemeriksaan hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian OH	95,000 1,000 200,000	
14.2	<b>Setingkat Pendidikan Menengah</b> a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b. Pemeriksaan hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian OH	110,000 1,000 250,000	
14.3	<b>Setingkat Pendidikan Tinggi</b> a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b. Pemeriksaan hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian OH	150,000 1,000 300,000	
14.4	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai</b> a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b. Pemeriksaan hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian OH	150,000 1,000 300,000	
14.5	<b>Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat</b> a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b. Pemeriksaan hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian OH	100,000 1,000 250,000	
15	<b>INSTRUKTUR</b> 1. Instruktur (Berstatus PNS) 2. Instruktur (Berstatus Non PNS)	OJ OJ	50,000 Sesuai Pasar	
16	<b>TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b> 16.1 <b>UANG LEMBUR (di luar jam kerja pada hari kerja)</b> a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 16.2 <b>UANG MAKAN LEMBUR</b>	OJ OJ OJ OJ OH lembur	7,000 9,000 11,000 13,000 15,000	
17	<b>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b> Kementerian Negara/Lembaga Dalam Negeri yang mempunyai 17.1 a. : - Kurang dari 40 pegawai - Lebih dari 40 pegawai 17.2 b. Perwakilan RI (termasuk Atase Teknis Dep. Di LN & ATHAN)	Tahun OT OT	26,000,000 650,000 \$ 1.270	
18	<b>PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b>	OT	930,000	
19	<b>UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>	OH	15,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	6,000	
21	PAKAIAN DINAS / KERJA RESMI PEGAWAI (TERMASUK ATRIBUT DAN ONGKOS JAHIT)	Stel	300,000	
22	PAKAIAN MAHASISWA/ TARUNA (TERMASUK ATRIBUT DAN ONGKOS JAHIT)	Stel	265,000	
23	PAKAIAN DINAS DOKTER/ PERAWAT (TERMASUK ATRIBUT DAN ONGKOS JAHIT)	Stel	175,000	
24	PAKAIAN SOPIR/ PESURUH (TERMASUK ATRIBUT DAN ONGKOS JAHIT)	Stel	175,000	
25	PAKAIAN SATPAM (TERMASUK PERLENGKAPAN)	Stel	340,000	
26	TOGA HAKIM (BELUM TERMASUK PERLENGKAPAN)			
	1. Toga Hakim Agung	Stel	3,400,000	
	2. Toga Hakim	Stel	550,000	
27	TOGA MAHASISWA (TERMASUK ATRIBUT)	Stel	175,000	
28	KONSUMSI RAPAT			
	1. Makan	Orang/Kali	20,000	
	2. Snack	Orang/Kali	7,500	
29	PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
	29.1 Dari Bahasa Asing ke Indonesia			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	68,000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	135,000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	
	29.2 Dari Bahasa Indonesia ke Asing			
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	85,000	
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	165,000	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	
30	PENCETAKAN			
	30.1 Buku/Formulir dan sebagainya			
	a. Folio HVS, 1 muka / 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	195	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	185	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	145	
	b. Folio HVS, 1 muka / 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	220	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	205	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	160	
	c. Double Folio HVS, 1 muka / 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	475	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	325	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	275	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Double Folio HVS, 1 muka / 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	500	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	350	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	300	
	e. Folio Edisi Lux (art paper) 1 warna			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	500	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	350	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	300	
	30.2 Leaflet / Brosur			
	- Folio Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka / 2 muka			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4,250	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	2,400	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	1,200	
	30.3 Poster (min 75 x 50 cm2)			
	- Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	7,100	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	4,700	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	2,500	
	30.4 Buletin (min 12 lembar)			
	- Folio HVS , 60 gram			
	- Oplah <= 300 eksemplar	Halaman	300	
	- Oplah > 300 eksemplar	Halaman	215	
	30.5 Cover Buku (2 warna)			
	- Oplah 100 - 500	Halaman	4,800	
	- Oplah > 500	Halaman	4,600	
	30.6 Cover Buku (4 warna)			
	- Oplah 100 - 500	Halaman	7,800	
	- Oplah > 500	Halaman	6,250	
31	<b>PENJILIDAN</b>	Eksemplar	8,700	
32	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS</b>			
	32.1 Pejabat Negara	UNIT	400,000,000	
	32.2 Eselon I	UNIT	300,000,000	
	32.3 Operasional Kantor/Lapangan			
	a. Bus Roda 6	UNIT	440,000,000	
	b. Roda 6/ Tiga per empat	UNIT	250,000,000	
	b. Roda 4/ Minibus	UNIT	200,000,000	
	b. Pick up	UNIT	130,000,000	
	c. Roda 2	UNIT	20,000,000	
	d. Motor Trail	UNIT	25,000,000	
33	<b>DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL</b>			
	33.1 Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 minggu)	Peserta/ Angkatan	19,000,000	
	33.2 Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 minggu)	Peserta/ Angkatan	11,680,000	
	33.3 Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 minggu)	Peserta/ Angkatan	10,195,000	
34	<b>LATIHAN PRAJABATAN</b>			
	34.1 Golongan III (Lama Diklat 22 hari)			
	a. CPNS Reguler (lama Diklat 14 hari)	Peserta/ Angkatan	2,105,000	
	b. CPNS Eks Honoror (Lama Diklat 24 hari)	Peserta/ Angkatan	3,165,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	34.2 Golongan I & II			
	a. CPNS Reguler (Lama Diklat 10 hari)	Peserta/ Angkatan	1,440,000	
	b. CPNS Eks Honorar (Lama Diklat 19 hari)	Peserta/ Angkatan	2,340,000	
35	<b>DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL PNS</b>	peserta/hari	510,000	
36	<b>DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (NON INSTITUSIONAL)</b>	peserta/hari	315,000	
37	<b>PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>			
	37.1 Anggota TNI/POLRI Non Organik			
	a. Ops. Pasukan termasuk crew kapal laut/terbang	OH	30,000	
	b. Dikma TNI/Polri	OH	24,000	
	c. Operasi dan Latihan/Diklat Lainnya/Pra Tugas Ops.	OH	24,000	
	d. Tahanan Anggota TNI/Polri	OH	19,000	
	e. Anggota yang sakit	OH	21,000	
	37.2 Narapidana / Tahanan	OH		
	a. Wilayah I	OH	10,500	
	b. Wilayah II	OH	11,500	
	c. Wilayah III	OH	12,500	
	37.3 Tahanan Kejaksaan/Polri	OH	15,000	
	37.4 Tahanan Imigrasi	OH	15,000	
	37.5 Pasien Rumah Sakit	OH	18,000	
	37.6 Anak asuhan (Panti)	OH	18,000	
	37.7 Tuna Sosial	OH	18,000	
	37.8 Mahasiswa Penerbangan	OH	21,000	
	37.9 Siswa Sekolah Pertanian/Sekolah Usaha Perikanan Menengah	OH	18,000	
	37.10 Mahasiawa Sekolah Tinggi Perikanan	OH	18,000	
	37.11 Mahasiswa STPDN/LLAJ	OH	21,000	
	37.12 Mahasiswa Akademi Migas	OH	18,000	
	37.13 Mahasiswa AKIP/ AIM	OH	21,000	
	37.14 Siswa Perawat Kesehatan	OH	18,000	
	37.15 Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial	OH	18,000	
	37.16 ABK Aktif	OH	21,000	
	37.17 ABK Cadangan	OH	15,000	
	37.18 Rescue Team	OH	21,000	
	37.19 Pengamat Laut	OH	18,000	
38	<b>PEMELIHARAAN GEDUNG</b>			
	38.1 Pemeliharaan Gedung Kantor	M2/Tahun	75,000	
	38.2 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	9,000	
	<b>PEMELIHARAAN GEDUNG UNTUK PERWAKILAN RI DI LN (TERMASUK ATASE TEKNIS DEP. DI LUAR NEGERI DAN ATHAN)</b>			
	38.3 Pemeliharaan Gedung Kantor	m2/ tahun	\$ 80	
	38.4 Pemeliharaan Wisma Duta/Konsul	m2/ tahun	\$ 80	
	38.5 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Wisma Duta/ Konsul	m2/ tahun	\$ 9	
39	<b>PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL SARANA KANTOR</b>			
	39.1 Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	26,000,000	
	b. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	18,000,000	
	c. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	16,350,000	
	d. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	2,800,000	
	e. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan RI di LN dan ATHAN	buah/ tahun	\$ 8.000	
	39.2 Speedboat	Unit/Tahun	12,250,000	
	39.3 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	40,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	39.4 Personal Komputer/Laptop, dan Printer	Unit/Tahun	680,000	
	39.5 AC Split	Unit/Tahun	350,000	
	39.6 Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/Tahun	4,550,000	
	39.7 Kendaraan Patroli Jalan Raya Polri Roda 4	Unit/Tahun	36,300,000	
	39.8 Kendaraan Patroli Jalan Raya Polri Roda 2	Unit/Tahun	24,200,000	
40	<b>SEWA KENDARAAN DAN MESIN FOTOKOPI</b>			
	40.1 Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	520,000	
	40.2 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	Unit/Hari	1,630,000	
	40.3 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	Unit/Hari	2,550,000	
	40.4 Sewa Mesin Fotokopi	Bulan/Unit	3,278,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

41. STANDAR BIAYA SEWA RUANG RAPAT DAN GEDUNG PERTEMUAN PER HARI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	RUANG BESAR	RUANG SEDANG	RUANG KECIL	GEDUNG PERTEMUAN
1	2	3	4	5	6
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,000,000	2,000,000	1,500,000	3,000,000
2	SUMATERA UTARA	4,000,000	2,000,000	1,000,000	8,000,000
3	RIAU	3,250,000	2,000,000	1,000,000	3,000,000
4	KEPULAUAN RIAU	2,500,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000
5	JAMBI	3,000,000	2,500,000	1,500,000	3,000,000
6	SUMATERA BARAT	2,500,000	2,000,000	1,000,000	3,000,000
7	SUMATERA SELATAN	2,000,000	1,500,000	1,000,000	4,000,000
8	LAMPUNG	3,000,000	1,500,000	1,000,000	8,000,000
9	BENGKULU	2,000,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000
10	BANGKA BELITUNG	2,000,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000
11	BANTEN	5,500,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000
12	JAWA BARAT	3,750,000	2,000,000	1,250,000	10,000,000
13	D.K.I. JAKARTA	3,500,000	2,500,000	1,250,000	22,000,000
14	JAWA TENGAH	6,000,000	3,500,000	2,000,000	5,500,000
15	D.I. YOGYAKARTA	3,000,000	2,000,000	1,500,000	3,500,000
16	JAWA TIMUR	4,500,000	3,000,000	1,500,000	10,000,000
17	BALI	4,500,000	3,500,000	2,000,000	5,000,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	7,500,000	2,500,000	1,500,000	6,000,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2,000,000	1,500,000	1,000,000	2,750,000
20	KALIMANTAN BARAT	2,700,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000
21	KALIMANTAN TENGAH	2,000,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000
22	KALIMANTAN SELATAN	4,500,000	2,400,000	1,800,000	15,000,000
23	KALIMANTAN TIMUR	5,250,000	2,800,000	1,750,000	4,500,000
24	SULAWESI UTARA	5,000,000	3,100,000	2,500,000	20,000,000
25	GORONTALO	2,000,000	1,500,000	1,000,000	3,250,000
26	SULAWESI BARAT	2,000,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000
27	SULAWESI SELATAN	3,500,000	1,800,000	1,000,000	6,000,000
28	SULAWESI TENGAH	4,500,000	2,100,000	1,200,000	4,000,000
29	SULAWESI TENGGARA	2,500,000	1,750,000	1,000,000	3,250,000
30	MALUKU	4,500,000	3,500,000	1,500,000	5,000,000
31	MALUKU UTARA	5,000,000	3,000,000	1,200,000	5,000,000
32	PAPUA	4,000,000	2,500,000	1,000,000	5,000,000
33	IRIAN JAYA BARAT	6,000,000	3,500,000	2,000,000	5,500,000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

42. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. BIAYA PENGINAPAN

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE	BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
			4	5	6	7	8
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2,350,000	1,755,000	1,140,000	760,000	365,000	250,000
2.	SUMATERA UTARA	4,400,000	1,100,000	900,000	550,000	300,000	240,000
3.	RIAU	3,450,000	1,210,000	860,000	665,000	330,000	245,000
4.	KEPULAUAN RIAU	3,410,000	770,000	625,000	500,000	260,000	185,000
5.	JAMBI	1,250,000	1,010,000	960,000	560,000	280,000	200,000
6.	SUMATERA BARAT	3,500,000	1,750,000	850,000	550,000	330,000	275,000
7.	SUMATERA SELATAN	2,250,000	1,250,000	895,000	400,000	350,000	250,000
8.	LAMPUNG	2,445,000	1,700,000	620,000	560,000	330,000	260,000
9.	BENGKULU	1,120,000	660,000	460,000	420,000	386,000	220,000
10.	BANGKA BELITUNG	1,075,000	690,000	475,000	430,000	300,000	210,000
11.	BANTEN	3,250,000	1,550,000	1,100,000	700,000	430,000	280,000
12.	JAWA BARAT	1,850,000	1,650,000	1,200,000	645,000	435,000	300,000
13.	D.K.I. JAKARTA	8,715,000	1,395,000	850,000	610,000	470,000	355,000
14.	JAWA TENGAH	4,045,000	1,490,000	885,000	750,000	395,000	280,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	3,750,000	1,020,000	750,000	510,000	350,000	225,000
16.	JAWA TIMUR	3,785,000	1,560,000	860,000	500,000	385,000	275,000
17.	BALI	4,510,000	1,650,000	1,210,000	935,000	770,000	495,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	2,280,000	1,200,000	660,000	495,000	350,000	215,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1,790,000	660,000	550,000	410,000	325,000	220,000
20.	KALIMANTAN BARAT	1,500,000	770,000	550,000	500,000	310,000	220,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	750,000	650,000	550,000	385,000	290,000	230,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	3,720,000	815,000	760,000	550,000	340,000	220,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	3,070,000	1,305,000	1,225,000	560,000	385,000	275,000
24.	SULAWESI UTARA	2,700,000	1,100,000	650,000	575,000	425,000	220,000
25.	GORONTALO	1,320,000	1,030,000	820,000	660,000	360,000	165,000
26.	SULAWESI BARAT	800,000	660,000	550,000	440,000	330,000	165,000
27.	SULAWESI SELATAN	4,000,000	1,000,000	790,000	750,000	400,000	275,000
28.	SULAWESI TENGAH	1,575,000	1,090,000	550,000	440,000	330,000	195,000
29.	SULAWESI TENGGARA	1,500,000	770,000	550,000	440,000	385,000	250,000
30.	MALUKU	1,500,000	750,000	600,000	450,000	240,000	165,000
31.	MALUKU UTARA	715,000	600,000	495,000	365,000	320,000	190,000
32.	PAPUA	2,050,000	1,550,000	970,000	475,000	375,000	275,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	1,530,000	1,230,000	930,000	900,000	330,000	290,000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

42. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

**B. TARIF TAXI DAN UANG HARIAN**

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	TARIF TAXI	UANG HARIAN
1	2	3	4
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90,000	300,000
2.	SUMATERA UTARA	65,000	300,000
3.	RIAU	55,000	300,000
4.	KEPULAUAN RIAU	65,000	300,000
5.	JAMBI	55,000	300,000
6.	SUMATERA BARAT	100,000	300,000
7.	SUMATERA SELATAN	85,000	300,000
8.	LAMPUNG	95,000	300,000
9.	BENGKULU	65,000	300,000
10.	BANGKA BELITUNG	55,000	300,000
11.	BANTEN	220,000	300,000
12.	JAWA BARAT	45,000	350,000
13.	D.K.I. JAKARTA	140,000	450,000
14.	JAWA TENGAH	40,000	300,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	50,000	350,000
16.	JAWA TIMUR	85,000	350,000
17.	BALI	85,000	400,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	30,000	350,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	110,000	350,000
20.	KALIMANTAN BARAT	80,000	300,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	65,000	300,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	90,000	300,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	275,000	350,000
24.	SULAWESI UTARA	80,000	300,000
25.	GORONTALO	220,000	300,000
26.	SULAWESI BARAT	65,000	300,000
27.	SULAWESI SELATAN	95,000	350,000
28.	SULAWESI TENGAH	35,000	300,000
29.	SULAWESI TENGGARA	90,000	300,000
30.	MALUKU	165,000	300,000
31.	MALUKU UTARA	110,000	300,000
32.	PAPUA	220,000	450,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	110,000	400,000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

43. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

B. UANG HARIAN (UANG SAKU,

TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN)

(dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA / KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
1	2	3	3	4	5	6	7
	<b>AMERIKA UTARA</b>						
1	Amerika Serikat	New York	523	470	415	342	
2	Kanada	Ottawa	443	401	366	306	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>						
3	Argentina	Buenos Aires	391	274	240	240	
4	Mexico	Mexico City	425	315	280	280	
5	Kuba	Havana	402	302	259	220	
6	Venezuela	Caracas	460	320	285	285	
7	Brazil	Brazillia	432	338	289	240	
8	Chile	Santiago	411	313	268	221	
9	Columbia	Bogota	382	278	238	220	
10	Peru	Limma	379	274	235	220	
11	Suriname	Paramaribo	394	292	250	206	
	<b>EROPA BARAT</b>						
12	Kerajaan Inggris	London	583	531	430	430	
13	Norwegia	Oslo	513	462	286	285	
14	Perancis	Paris/Marseilles	508	461	380	380	
15	Belgia	Brussel	462	416	280	280	
16	Belanda	Den Haag	459	413	270	270	
17	Swiss	Bern/Jenewa	505	453	320	320	
18	Rep. Federasi Jerman	Berlin/Hamburg	439	408	280	280	
19	Austria	Wina	500	450	316	316	
20	Denmark	Kopenhagen	468	424	273	240	
21	Spanyol	Madrid	453	410	285	285	
22	Yunani	Athena	418	376	240	240	
23	Portugal	Lisabon	421	379	240	240	
	<b>EROPA TIMUR DAN UTARA</b>						
24	Finlandia	Helsinki	449	406	352	312	
25	Italia	Roma/ Vatikan	516	469	370	370	
26	Swedia	Stockholm	462	433	340	340	
27	Rusia	Moscow	552	509	405	405	
28	Bulgaria	Sofia	402	364	318	283	
29	Czech	Praha	422	387	329	292	
30	Hongaria	Budapest	417	378	337	299	
31	Polandia	Warsawa	397	358	311	276	
32	Rumania	Bukharest	412	378	311	276	
33	Yugoslavia	Beograd	397	358	311	276	
34	Ukraina	Kiev	421	379	326	289	
35	Uzbekistan	Tashkent	388	349	285	253	
36	Slovakia	Bratislava	425	384	333	296	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

(dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA / KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
1	2	3	3	4	5	6	7
	<b><u>AFRIKA</u></b>						
37	Algeria	Aljazair	338	305	285	285	
38	Maroko	Rabat	300	248	190	190	
39	Tunisia	Tunis	289	238	185	185	
40	Nigeria	Abuja	357	310	290	290	
41	Senegal	Dakar	330	273	204	200	
42	Ethiopia	Addis Ababe	308	254	190	166	
43	Kenya	Nairobi	330	273	204	195	
44	Madagaskar	Tananarivo	292	241	180	180	
45	Tanzania	Dar Es Salaam	326	269	201	181	
46	Zimbabwe	Harare	281	241	214	214	
47	Namibia	Windhoek	296	244	183	160	
48	Afrika Selatan	Cape Town/Pretoria	300	248	200	200	
49	Sudan	Khartoum	338	279	208	183	
50	Libya	Tripoli	304	251	187	164	
	<b><u>TIMUR TENGAH</u></b>						
51	Mesir	Cairo	364	270	210	189	
52	Irak	Baghdad	393	280	218	200	
53	Arab Suriah	Damascus	354	254	198	195	
54	Saudi Arabia	Riyadh/Jeddah	387	273	213	200	
55	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	455	299	300	300	
56	Kuwait	Kuwait	402	280	255	255	
57	Yordania	Amman	361	251	195	195	
58	Turki	Ankara	361	267	208	187	
59	Iran	Teheran	347	257	200	180	
60	Yaman	Sana'a	349	238	195	195	
61	Libanon	Beirut	353	264	205	185	
62	Qatar	Doha	382	273	213	195	
	<b><u>ASIA TENGAH DAN TIMUR</u></b>						
63	India	New Delhi/Mumbai	348	260	240	266	
64	Bangladesh	Dacca	335	193	165	256	
65	Pakistan	Karachi/Islamabad	339	200	180	260	
66	Srilanka	Colombo	344	198	165	263	
67	Hongkong	Hongkong	468	317	285	358	
68	Jepang	Tokyo/Osaka	515	300	260	260	
69	Korea Selatan	Seoul	417	323	295	319	
70	Korea Utara	Pyong Yang	391	235	205	299	
71	Rep.Rakyat Cina	Beijing/Guang Zhou	374	235	205	286	
72	Kamboja	Phnom Penh	292	220	195	223	
73	Afganistan	Kaboul	381	223	171	296	
	<b><u>ASIA TENGGARA</u></b>						
74	Philipina	Manila/Davao City	408	275	220	220	
75	Singapura	Singapore	420	287	222	220	
76	Malaysia	Kuala Lumpur/Kuching	377	250	210	210	
77	Thailand	Bangkok/Songkhla	388	272	209	200	
78	Myanmar	Yangoon	364	247	195	195	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

(dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA / KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KETERANGAN
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
1	2	3	3	4	5	6	7
79	Laos	Vientiane	376	259	200	195	
80	Vietnam	Hanoi/Ho Chi Minh	379	262	202	195	
81	Brunei Darussalam	Bandar S Begawan	370	253	195	195	
	<b>ASIA PASIFIK</b>						
82	Australia	Sydney/Canberra	435	400	270	270	
83	Selandia Baru	Wellington	388	243	220	220	
84	Kaledonia Baru	Noumea	421	384	274	223	
85	Papua Nugini	Port Moresby/Vanimo	381	350	235	191	
86	Timor Leste	Dili	388	351	227	195	
87	Fiji	Suva	359	326	219	178	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

43. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
A. TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		First	Business	Published
1	2	3	4	5
	ASIA PACIFIC			
1	Bandar Seri Bagawan	645	533	463
2	Bangkok	1,147	947	823
3	Beijing	2,262	1,868	1,623
4	Canberra	2,886	2,383	2,070
5	Colombo	1,935	1,598	1,388
6	Darwin	1,719	1,419	1,233
7	Davao City	1,749	1,445	1,255
8	Dhaka	1,224	1,011	878
9	Hanoi	1,833	1,514	1,315
10	Ho Chi Minh	991	818	711
11	Hongkong	1,719	1,419	1,233
12	Islambad	2,750	2,271	1,973
13	Johor Baharu	495	409	355
14	Karachi	2,611	2,156	1,873
15	Kinabalu	690	570	495
16	Kuala Lumpur	572	472	410
17	Manila	1,457	1,203	1,045
18	Melbourne	2,635	2,176	1,890
19	New Delhi	2,332	1,926	1,673
20	Nourmea	3,843	3,174	2,757
21	Osaka	2,572	2,124	1,845
22	Penang	697	576	500
23	Perth	2,126	1,755	1,525
24	Pnom Penh	1,217	1,005	873
25	Port Moresby	2,439	2,014	1,750
26	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
27	Rangoon	1,914	1,580	1,373
28	Seoul	2,421	1,999	1,737
29	Singapore	539	445	387
30	Sydney	2,635	2,176	1,890
31	Tokyo	2,558	2,112	1,835
32	Vanimo	3,318	2,740	2,380
33	Vientiane	1,367	1,129	981
34	Wellington	3,721	3,072	2,669
35	Yangon	1,468	1,212	1,053
	MIDDLE EAST			
36	Abu Dhabi	4,180	3,191	2,727
37	Amman	5,433	4,148	3,545
38	Baghdad	5,433	4,148	3,545
39	Beirut	5,717	4,364	3,730
40	Damascus	5,096	3,890	3,325



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		First	Business	Published
1	2	3	4	5
	<b>AFRICA</b>			
41	Doha	4,207	3,212	2,745
42	Jeddah	4,958	3,785	3,235
43	Kaboul	3,386	2,585	2,209
44	Kuwait	4,767	3,639	3,110
45	Riyadh	4,598	3,510	3,000
46	Sanaa	5,013	3,827	3,271
47	Teheran	4,475	3,416	2,920
48	Addis Ababa	7,472	5,704	4,955
49	Algeria	8,610	6,593	5,710
50	Aljazair	5,632	4,299	3,735
51	Antananarivo	11,779	8,991	7,811
52	Cairo	5,361	4,092	3,555
53	Cape Town	11,053	8,438	7,330
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Dar Es Salaam	8,645	6,599	5,733
56	Harare	8,666	6,615	5,747
57	Johannesburg	5,353	4,086	3,550
58	Khartoum	5,904	4,507	3,915
59	Lagos	10,281	7,848	6,818
60	Nairobi	7,966	6,081	5,283
61	Rabbat	6,205	4,737	4,115
62	Tripoli	6,551	4,092	3,555
63	Tunisia	6,296	4,806	4,175
64	Windhoek	11,325	8,645	7,510
	<b>EUROPE</b>			
65	Amsterdam	6,177	3,834	3,331
66	Ankara	6,641	4,122	3,581
67	Attens	14,911	9,256	8,041
68	Beograd	9,921	6,158	5,350
69	Berlin	7,342	4,557	3,959
70	Bern	8,076	5,013	4,355
71	Bonn	6,960	4,320	3,753
72	Bratislava	6,993	4,341	3,771
73	Brussels	7,177	4,455	3,870
74	Bucharest	7,627	4,734	4,113
75	Copenhagen	6,917	4,294	3,730
76	Geneva	8,035	4,988	4,333
77	Hamburg	7,093	4,403	3,825
78	Helsinki	6,826	4,237	3,681
79	Kiev	9,630	5,978	5,193
80	Lisbon	6,274	3,894	3,383
81	London	7,701	4,781	4,153
82	Madrid	6,733	4,180	3,631



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-18-

(dalam US\$)

NO	K O T A	KLASIFIKASI		
		First	Business	Published
1	2	3	4	5
83	Marseilles	6,567	4,076	3,541
84	Moscow	9,537	5,920	5,143
85	Oslo	7,509	4,661	4,049
86	Paris	6,177	3,834	3,331
87	Praque	6,400	3,972	3,451
88	Rome	7,141	4,433	3,851
89	Sofia	6,567	4,076	3,541
90	Stockholm	6,366	3,952	3,433
91	Tashkent	13,617	8,453	7,343
92	Vienna	6,225	3,864	3,357
93	Warsawa	6,392	3,968	3,447
	<b>AMERICA -CANADA</b>			
94	Bogota	12,348	9,426	7,713
95	Brazilia	11,966	9,134	5,970
96	Boenos Aires	11,966	9,134	5,970
97	Caracas	8,213	9,269	5,130
98	Chicago	7,189	5,488	3,587
99	Havana	14,702	11,223	7,335
100	Houston	7,197	5,494	3,591
101	Los Angeles	7,639	4,365	2,853
102	Mexico City	7,115	5,432	3,550
103	New York	10,049	5,742	3,753
104	Ottawa	5,374	4,103	3,357
105	Paramaribo	11,772	8,986	7,353
106	San Fransisco	7,419	4,240	2,771
107	Santiago de Chile	9,819	7,495	6,133
108	Toronto	2,931	2,238	1,831
109	Vancouver	6,721	4,393	2,871
109	Washington	11,463	6,550	3,743



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

**44. TARIF PAKET KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN  
UNTUK LOKASI DI LUAR KANTOR PER ORANG PER HARI**

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	TARIF PER ORANG PER HARI
1	2	3
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	330,000
2.	SUMATERA UTARA	365,000
3.	RIAU	310,000
4.	KEPULAUAN RIAU	360,000
5.	JAMBI	360,000
6.	SUMATERA BARAT	300,000
7.	SUMATERA SELATAN	370,000
8.	LAMPUNG	325,000
9.	BENGKULU	300,000
10.	BANGKA BELITUNG	325,000
11.	BANTEN	475,000
12.	JAWA BARAT	400,000
13.	D.K.I. JAKARTA	450,000
14.	JAWA TENGAH	470,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	360,000
16.	JAWA TIMUR	400,000
17.	BALI	450,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	325,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	350,000
20.	KALIMANTAN BARAT	360,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	325,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	400,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	450,000
24.	SULAWESI UTARA	300,000
25.	GORONTALO	330,000
26.	SULAWESI BARAT	350,000
27.	SULAWESI SELATAN	350,000
28.	SULAWESI TENGAH	300,000
29.	SULAWESI TENGGARA	350,000
30.	MALUKU	375,000
31.	MALUKU UTARA	350,000
32.	PAPUA	425,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	500,000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

-20-

45.A. TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR  
DALAM NEGERI (D.I D.III DAN D.IV - S1)

NO.	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN		KETERANGAN
		D.I - D.III	D.IV - S1	
1	2	3	4	5
I	Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Disertai bukti pengeluaran
II	Transport 1. Transport Awal Program 2. Transport Akhir Program	Sesuai pengeluaran Idem	Sesuai pengeluaran Idem	Disertai bukti pengeluaran, 1 x pergi Disertai bukti pengeluaran, 1 x pergi
III	Tunjangan Awal Program/Akhir Program	Maksimal 6 hari	Maksimal 6 hari	Tunjangan diberikan dalam bentuk tunjangan harian
IV	Uang Kuliah 1. Biaya Alih Tahun (bila ada) 2. Uang Kuliah/semester (maksimum)	Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran	- Disertai bukti pengeluaran - Sesuai ketentuan pada masing-masing PTN setempat dan disertai bukti pengeluaran.
V	Waktu Kuliah (Maksimum)	D I = 3 Semester D II = 5 Semester D III = 7 Semester	D IV = 10 Semester S I = 11 Semester	
VI	Tunjangan Biaya Hidup : Tunjangan Biaya Hidup :	Rp. 800.000,-/bulan	Rp. 850.000,-/bulan	
VII	Biaya Operasional 1. Transport Lokal 2. ATK 3. Sewa Komputer	Rp. 110.000,-/bulan Rp. 45.000,-/bulan Disediakan instansi Pengirim	Rp. 110.000,-/bulan Rp. 60.000,-/bulan Disediakan instansi Pengirim	
VIII	Tunjangan Buku dan Referensi 1. Buku Utama  2. Manual 3. Diklat 4. Fotokopi artikel 5. Langganan e-mail, virtual library + disket	D I = 3 Buku, 10 Diklat D II = 6 Buku, 20 Diklat D III = 10 Buku, 20 Diklat  Rp.40.000,-/buku Rp.40.000,- -	20 Buku + 50 Diklat  - Rp.55.000,-/buku Rp.55.000,- -	Maksimum Rp.60.000,-/buku Total tunj. maksimum Rp. 1 juta    batas maksimum
IX	Tunjangan Riset 1. Proposal ATK 2. Penelitian a. Eksperimental : 1) Laboratorium 2) Lapangan b. Penelitian Non-Eksperimental : 1) Survey 2) Studi Numerik/Simulasi Komputer c. Penelitian Seri : 1) Survey 2) Penciptaan Karya Seni 3. Penyusunan Karya Ilmiah 4. Seminar 5. Ujian 6. Penggandaan/Penjilidan : Proposal, Skripsi/Tesis, Desertasi	- - - - - - - - - - -	Rp130,000  Rp1,600,000 Rp1,200,000  Rp800,000 Rp3,300,000  Rp800,000 Rp2,300,000 Rp300,000 Rp70,000 Sesuai bukti Pengeluaran Rp40,000	Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal
X	Biaya Matrikulasi Biaya Matrikulasi	0	0	- Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi berkenaan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

45.B. TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR  
DALAM NEGERI (S2/Sp-1 DAN S3/Sp-2)

NO.	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN		KETERANGAN
		S2/Sp-1	S3/Sp-2	
1	2	3	4	5
I	<b>Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi</b>	Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran	Disertai bukti pengeluaran
II	<b>Transport</b> 1. Transport Awal Program 2. Transport Akhir Program	Sesuai pengeluaran Idem	Sesuai pengeluaran Idem	Disertai bukti pengeluaran, 1 x pergi Disertai bukti pengeluaran, 1 x pergi
III	<b>Tunjangan Awal Program/Akhir Program</b>	Maksimal 6 hari	Maksimal 6 hari	Tunjangan diberikan dalam bentuk tunjangan harian
IV	<b>Uang Kuliah</b> 1. Biaya Alih Tahun (bila ada) 2. Uang Kuliah/semester (maksimum)	Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran	Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran	- Disertai bukti pengeluaran - Sesuai ketentuan pada masing-masing PTN setempat dan disertai bukti pengeluaran.
V	<b>Waktu Kuliah (Maksimum)</b>	5 Semester	8 Semester	
VI	<b>Tunjangan Biaya Hidup :</b> Tunjangan Biaya Hidup :	Rp. 1.050.000,-/bulan	Rp. 1.050.000,-/bulan	
VII	<b>Biaya Operasional</b> 1. Transport Lokal 2. ATK 3. Sewa Komputer	Rp. 110.000,-/bulan Rp. 80.000,-/bulan Disediakan instansi Pengirim	Rp. 110.000,-/bulan Rp. 110.000,-/bulan Disediakan instansi Pengirim	
VIII	<b>Tunjangan Buku dan Referensi</b> 1. Buku Utama  2. Manual 3. Diktat 4. Fotokopi artikel 5. Langganan e-mail, virtual library + disket	S2 : 15 Buku + 50 Diktat Sp-1 : 9 Buku + 16 Manual  Rp.50.000,-/manual Rp.55.000,-/buku Rp.165.000,- Rp860,000	S3 : 20 Buku Sp-2 : 15 Buku + 5 Manual  Rp.50.000,-/manual Rp.200.000,- Rp860,000	Maksimum Rp.60.000,-/buku Total tunj. maksimum Rp. 1 juta    batas maksimum
IX	<b>Tunjangan Riset</b> 1. Proposal ATK 2. Penelitian a. Eksperimental : 1) Laboratorium 2) Lapangan b. Penelitian Non-Eksperimental : 1) Survey 2) Studi Numerik/Simulasi Komputer c. Penelitian Seri : 1) Survey 2) Penciptaan Karya Seni 3. Penyusunan Karya Ilmiah 4. Seminar 5. Ujian 6. Penggandaan/Penjilidan : Proposal, Skripsi/Tesis, Desertasi	Rp130,000  Rp3,300,000 Rp2,300,000  Rp1,650,000 Rp440,000  Rp1,700,000 Rp4,600,000 Rp600,000 Rp70,000 Sesuai bukti Pengeluaran Rp700,000	Rp130,000  Rp4,800,000 Rp3,600,000  Rp2,400,000 Rp7,300,000  Rp2,300,000 Rp7,300,000 Rp1,100,000 Rp70,000 Sesuai bukti Pengeluaran Rp1,200,000	Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal Batas maksimal      Batas maksimal
X	<b>Biaya Matrikulasi</b> Biaya Matrikulasi	- Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi berkenaan.	- Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi berkenaan.	- Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi berkenaan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

46. KEGIATAN-KEGIATAN BERSKALA INTERNASIONAL

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009
1	2	3	4
1	<b>SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL)</b>		
	1.1. Pengarah	Orang/Hari	650,000
	1.2. Penanggung Jawab	Orang/Hari	600,000
	1.3. Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	550,000
	1.4. Ketua Delegasi	Orang/Hari	550,000
	1.5. Tim Asistensi	Orang/Hari	550,000
	1.6. Anggota Delegasi	Orang/Hari	500,000
	1.7. Koordinator	Orang/Hari	500,000
	1.8. Ketua Bidang	Orang/Hari	400,000
	1.9. Sekretaris	Orang/Hari	400,000
	1.10. Anggota Delegasi	Orang/Hari	350,000
	1.11. Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	350,000
	1.12. Staf Pendukung	Orang/Hari	300,000
2	<b>WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL</b>		
	2.1. Pengarah	Orang/Hari	550,000
	2.2. Penanggung Jawab	Orang/Hari	500,000
	2.3. Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	450,000
	2.4. Ketua Delegasi	Orang/Hari	450,000
	2.5. Tim Asistensi	Orang/Hari	450,000
	2.6. Anggota Delegasi	Orang/Hari	400,000
	2.7. Koordinator	Orang/Hari	400,000
	2.8. Ketua Bidang	Orang/Hari	300,000
	2.9. Sekretaris	Orang/Hari	300,000
	2.10. Anggota Delegasi	Orang/Hari	250,000
	2.11. Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	250,000
	2.12. Staf Pendukung	Orang/Hari	200,000
3	<b>NARA SUMBER KEGIATAN BERSKALA INTERNASIONAL</b>		
	3.1. Nara Sumber Kelas A	Orang/Hari	\$ 300
	3.2. Nara Sumber Kelas B	Orang/Hari	\$ 250
	3.3. Nara Sumber Kelas C	Orang/Hari	\$ 200



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

47. INDEKS KONSUMSI KEGIATAN DI LUAR KANTOR

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	TARIF PER ORANG
1	2	3
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	80,000
2.	SUMATERA UTARA	85,000
3.	RIAU	85,000
4.	KEPULAUAN RIAU	75,000
5.	JAMBI	80,000
6.	SUMATERA BARAT	65,000
7.	SUMATERA SELATAN	55,000
8.	LAMPUNG	55,000
9.	BENGKULU	55,000
10.	BANGKA BELITUNG	75,000
11.	BANTEN	85,000
12.	JAWA BARAT	85,000
13.	D.K.I. JAKARTA	95,000
14.	JAWA TENGAH	80,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	85,000
16.	JAWA TIMUR	80,000
17.	BALI	80,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	65,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	80,000
20.	KALIMANTAN BARAT	55,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	55,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	85,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	90,000
24.	SULAWESI UTARA	80,000
25.	GORONTALO	80,000
26.	SULAWESI BARAT	55,000
27.	SULAWESI SELATAN	80,000
28.	SULAWESI TENGAH	65,000
29.	SULAWESI TENGGARA	55,000
30.	MALUKU	75,000
31.	MALUKU UTARA	65,000
32.	PAPUA	75,000
33.	IRIAN JAYA BARAT	90,000

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP. 660041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

**PENJELASAN**  
**LAMPIRAN STANDAR BIAYA UMUM 2009**

1.	<b>Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b> Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja berdasarkan besaran pagu yang dikelola. Pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jumlah staf maksimum 6 (enam) orang termasuk Pembuat Daftar Gaji (PDG). Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK jumlah staf pengelola keuangan maksimum 3 (tiga) orang termasuk Pembuat Daftar Gaji (PDG), untuk masing-masing PPK maksimal 2 (dua) orang. Jumlah seluruh Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun maksimal 10 % dari pagu. Untuk pejabat penguji dan penandatanganan SPM diberikan kepada satu orang.
2.	<b>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b> a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (maksimal 1 orang). b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna barang/jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
3.	<b>Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa per Paket</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4.	<b>Pengelola PNB</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak. Jumlah Sekretariat/Anggota pengelola paling banyak 5 (lima) orang.
5.	<b>Pelaksana Kegiatan Peneliti</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang bekerja sebagai peneliti pada kementerian negara/lembaga yang pelaksanaan penelitiannya memerlukan waktu melebihi jam kerja normal, dihitung maksimal 4 jam sehari.
6.	<b>Narasumber Dalam Rangka Seminar, Rakor, Sosialisasi, dan Desiminasi Untuk Kegiatan Inter Departemen</b> Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber baik di luar maupun di dalam unit eselon I penyelenggara, yang menjadi narasumber pada kegiatan Seminar, Rakor, Sosialisasi, dan Desiminasi yang melibatkan peserta dari unit eselon I lainnya.



7.	<b>Penyuluh Non PNS</b> Satuan biaya yang diberikan kepada pegawai (Non PNS) yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat berwenang ditugaskan untuk melakukan penyuluhan sesuai penugasannya.
8.	<b>Pengemudi, Pramubakti, Satpam dan Cleaning Service</b> Satuan biaya diberikan kepada pegawai (Non PNS) yang berdasarkan Surat Keputusan KPA/kontrak kerja ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya. Untuk pengemudi, pramubakti, satpam dan <i>cleaning service</i> yang pelaksanaannya melalui jasa pihak ke-3/diborongkan satuan biayanya dapat ditambah sebesar maksimal 15 persen.
9.	<b>Tim Pelaksana Kegiatan</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/ Menteri/ Eselon I/KPA diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus ( <i>adhoc</i> ). Pembentukan Tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
10.	<b>Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat berwenang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi.
11.	<b>Tim Penyusunan Jurnal</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat berwenang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Jurnal adalah : majalah yang khusus memuat artikel di satu bidang ilmu tertentu.
12.	<b>Tim Penyusunan Buletin/Majalah</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat berwenang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah. <i>Catatan :</i> Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
13.	<b>Pengelola Satker Yang Hanya Mengelola Gaji</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat berwenang ditunjuk untuk mengelola gaji.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

14.	<b>Vakasi Penyelenggara Ujian</b> Uang imbalan bagi penguji/pemeriksa kertas/jawaban ujian/pengawas ujian. Untuk pengawas ujian sudah termasuk bantuan uang transport. Vakasi penyelenggara ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang sifatnya berupa latihan dan ujian lokal.
15.	<b>Instruktur</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat berwenang diberi tugas untuk mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Untuk instruktur yang berstatus non-PNS standar biayanya berpedoman pada tarif yang berlaku di pasaran sesuai dengan bidangnya.
16.	<b>Tarif Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu ;</li><li>Pada hari libur kerja tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja</li><li>Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali per hari.</li></ol>
17.	<b>Keperluan Sehari-hari Perkantoran</b> Digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, barang cetakan, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat dan biaya penerimaan tamu. Untuk satker yang memiliki pegawai kurang dari 40 pegawai dialokasikan sesuai dengan kebutuhan atau maksimal Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) , sedangkan untuk satker yang memiliki pegawai lebih dari 40 pegawai dialokasikan sesuai indeks dikalikan dengan jumlah pegawai.
18.	<b>Penggantian Inventaris Lama dan atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru</b> Untuk penggantian inventaris maksimal 10 % dari jumlah pegawai (minimal 5 pegawai) sedangkan pengadaan inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
19.	<b>Uang Makan PNS</b> Uang makan diberikan kepada PNS/CPNS yang dihitung secara harian maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja.
20.	<b>Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh</b> Diperuntukkan bagi pegawai fungsional seperti tenaga fungsional komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas foto <i>x-ray</i> dan petugas berisiko tinggi yang sejenis.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

21.	<b>Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai (Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit)</b> Diperuntukkan bagi pegawai satuan kerja yang tugas pokok fungsi instansi tersebut berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan penyediaannya selektif serta telah memiliki ijin prinsip dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
22.	<b>Pakaian Dinas Mahasiswa/Taruna (Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit)</b> Diperuntukkan bagi Mahasiswa dari satuan kerja dan pemberian seragam dinas tersebut telah memiliki ijin prinsip dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
23.	<b>Pakaian Dinas Dokter/Perawat (Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit).</b> Diperuntukkan bagi dokter/perawat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penyediaannya selektif.
24.	<b>Pakaian Sopir/Pesuruh (Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit).</b> Diperuntukkan bagi Sopir/Pesuruh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Maksimal dapat diberikan 2 stel/tahun.
25.	<b>Pakaian Satpam (Termasuk Perlengkapan)</b> Pakaian dinas Satpam termasuk perlengkapan (Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Peluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos Security dan atribut lainnya) maksimal dapat diberikan 2 stel/tahun.
26.	<b>Toga Hakim</b> Tidak termasuk atribut/perlengkapan.
27.	<b>Toga Mahasiswa</b> Diperuntukkan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi/Akademi.
28.	<b>Konsumsi Rapat</b> Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan peserta berasal dari lintas eselon I/instansi/wilayah.
29.	<b>Penerjemahan dan Pengetikan</b> Biaya yang dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
30.	<b>Pencetakan</b> Satuan biaya untuk pencetakan yang diberikan dalam rangka menunjang kegiatan.
31.	<b>Penjilidan</b> Satuan biaya untuk penjilidan yang diberikan dalam rangka menunjang kegiatan.
32.	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas</b> Satuan biaya untuk pengadaan kendaraan operasional dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.



33.	<b>Diklat Pimpinan/Struktural</b> Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh ps. 22) dan biaya perjalanan dinas peserta. Indeks Diklat Pim III dan IV belum termasuk biaya Observasi Lapangan.
34.	<b>Latihan Prajabatan</b> Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh ps. 22) dan biaya perjalanan dinas peserta.
35.	<b>Diklat Fungsional dan Teknis</b> Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Indeks ini digunakan bagi diklat yang dilaksanakan di dalam gedung milik instansi berkenaan.
36.	<b>Diklat Ketrampilan untuk Masyarakat (Non Institusional)</b> Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan peserta. Indeks ini digunakan bagi instansi yang telah memiliki sarana dan prasarana diklat pada instansi berkenaan.
37.	<b>Pengadaan Bahan Makanan</b> Untuk barang hasil olahan sudah termasuk pajak. Khusus Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan dibedakan berdasarkan rayonisasi sebagai berikut : Wilayah I : Sulawesi Utara, Bali Sulawesi Selatan, Lampung, Gorontalo, DIY, NTB, Jawa Timur, Jawa Timur dan Sumatera Selatan Wilayah II : Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Jambi, Jawa Barat, NTT, Riau, Bengkulu Kalimantan Barat, Maluku dan Banten Wilayah III : Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan NAD.
38.	<b>I. Pemeliharaan Gedung Dalam Negeri</b> Pemeliharaan gedung yang dimaksud adalah pemeliharaan agar gedung/bangunan berada dalam kondisi semula atau dengan tingkat kerusakan gedung/bangunan kurang dari atau sama dengan 2 % dan nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu asset.
	<b>II. Pemeliharaan Gedung untuk Perwakilan RI di luar negeri (termasuk atase teknis Dep. di luar negeri dan Athan)</b> Pemeliharaan gedung yang dimaksud adalah pemeliharaan agar gedung/bangunan berada dalam kondisi semula atau pemeliharaan dengan tingkat kerusakan gedung/bangunan kurang dari atau sama dengan 2 % dan nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu asset.
39.	<b>Pemeliharaan dan Biaya Operasional Sarana Kantor</b> Pemeliharaan untuk mempertahankan inventaris/peralatan dan mesin lain (termasuk di dalamnya kendaraan operasional) agar berada dalam kondisi normal dan nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi.
40.	<b>Sewa Kendaraan dan Mesin Fotokopi</b> Sewa Kendaraan termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.



41.	<p><b>Sewa ruangan untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ruang Besar adalah sewa ruangan dan fasilitas dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang yang terdapat di dalam hotel.</li><li>▪ Ruang Sedang adalah sewa ruangan dan fasilitas dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang yang terdapat di dalam hotel.</li><li>▪ Ruang Kecil adalah sewa ruangan dan fasilitas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang yang terdapat di dalam hotel.</li></ul> <p>Gedung Pertemuan adalah sewa gedung dan fasilitas dengan kapasitas diatas 300 orang yang digunakan untuk sosialisasi dan kegiatan sejenis.</p>
42.	<p><b>Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b></p> <p>Tarif hotel yang dicantumkan digunakan untuk pengalokasian dana dalam rangka perencanaan anggaran, dalam pelaksanaannya digunakan <i>at cost</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Uang Harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport lokal</li><li>b. Peruntukan hotel berbintang :<ol style="list-style-type: none"><li>1). Hotel Bintang Lima : Pejabat Negara (Ketua/wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Menteri) dan yang setara</li><li>2). Hotel Bintang Empat : Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II</li><li>3). Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon III/Gol. IV</li><li>4). Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV/Gol. III</li><li>5). Hotel Bintang Satu : PNS Gol. II dan I</li></ol></li><li>c. Untuk Pejabat Negara (Ketua/wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Menteri) diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.</li><li>d. Pejabat Negara (Ketua/wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Menteri), Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II diberikan uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000,-, Rp. 150.000,- dan Rp. 100.000,-.</li><li>e. Pejabat Negara (Ketua/wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Menteri), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan secara <i>at cost</i> (maksimal sebesar Rp. 520.000,- per hari)</li><li>f. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.</li><li>g. Kegiatan <i>workshop</i>, sosialisasi, desiminasi, rapat teknis dan atau kegiatan lain yang serupa (dapat pula melibatkan unsur masyarakat) yang pelaksanaannya di dalam batas satu kota, <u>maka para peserta (PNS maupun Non PNS) dapat diberikan uang harian sebesar maksimal Rp. 110.000/orang/hari.</u> Untuk PNS pemberian uang harian sepanjang :<ul style="list-style-type: none"><li>- PNS tersebut disertai surat tugas</li><li>- Kegiatan bersifat antar departemen</li><li>- Kegiatan bersifat non rutin.</li></ul></li></ol>



	<p>h. Tarif taxi merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju bandara maupun sebaliknya yang dihitung satu kali perjalanan (<i>one way</i>).</p>
43.	<p><b>Perjalanan Dinas Luar Negeri</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Uang harian dikelompokkan sebagai berikut : Golongan A : Menteri, Ketua &amp; Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pejabat Negara Lainnya yang setara) Golongan B : Duta Besar, Duta yang menjabat Kepala Perwakilan, PNS Gol. IV/c ke atas, Perwira Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Pejabat Negara Lainnya yang setara Golongan C : PNS Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri yang setara Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri</li><li>▪ Tarif pesawat (<i>First, Business dan Published</i>) untuk kegiatan perjalanan ke luar negeri merupakan satuan biaya perjalanan pulang pergi (pp).</li><li>▪ Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarif <i>First Class</i> untuk perjalanan dinas Golongan A</li><li>- Tarif <i>Bussines Class</i> untuk perjalanan dinas Golongan B</li><li>- Tarif <i>Published</i> untuk perjalanan dinas Golongan C dan D dengan ketentuan apabila perjalanan ditempuh melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan tarif <i>Bussines Class</i>.</li></ul></li></ul>
44.	<p><b>Paket Kegiatan Rapat / pertemuan untuk lokasi diluar kantor</b></p> <p>Standar Biaya untuk kegiatan pertemuan/rapat selama satu hari (full board) di hotel bintang didalamnya termasuk :</p> <p>Minuman selamat datang, Akomodasi 1 malam (1 kamar 2 orang), Makan (3 kali), Rehat Kopi dan Snack (2 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, Podium, Flip Chart, White Board, Standar Sound System, Mikropon, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peserta rapat/pertemuan dapat diberikan uang sidang sebagai pengganti uang harian sebesar 75% dari tarif uang harian per hari selama kegiatan berlangsung.</li><li>- Dalam hal untuk mengikuti kegiatan tersebut yang bersangkutan harus tiba sebelum hari dimulainya kegiatan (faktor kesulitan transportasi) maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan <i>at cost</i> dan uang harian sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku.</li></ul>
45.	<p><b>Tunjangan Tugas Belajar Beasiswa/Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri</b></p> <p>Bantuan Bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.</p>



46.	<p><b>1. Sidang/Konferensi International -(KTM, SOM Bilateral/Regional/Multilateral)</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri pejabat setingkat Menteri atau <i>Senior Official</i>. Jumlah hari (maksimum) pemberian honor : Konferensi Tingkat Menteri (KTM) = 3 hari sebelum kegiatan + Hari kegiatan + 2 Hari setelah kegiatan. Senior Official Meeting (SOM) = 2 hari sebelum kegiatan + 1 Hari kegiatan + 2 Hari setelah kegiatan.  Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan. Uang harian perjalanan dinas tidak diberikan lagi kepada PNS yang telah diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri pejabat setingkat Menteri atau <i>Senior Official</i>.</p>
	<p><b>2. Workshop/ Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala International</b> Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan <i>Workshop/Seminar/ Sosialisasi/Sarasehan Berskala International</i>. Jumlah hari (maksimum) pemberian honor : <i>Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala International</i> = 1 hari sebelum kegiatan + Hari kegiatan + 1 Hari setelah kegiatan. Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan. Uang harian perjalanan dinas tidak diberikan lagi kepada PNS yang telah diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan <i>Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala International</i>.</p>
	<p><b>3. Narasumber kegiatan berskala international</b> Satuan biaya yang diberikan kepada Narasumber Non PNS untuk kegiatan <i>Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan</i> yang diselenggarakan di luar negeri Narasumber Kelas A = Narasumber Non PNS yang disetarakan dengan Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Narasumber Kelas B = Narasumber Non PNS yang disetarakan dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, Duta Besar yang menjabat Kepala Perwakilan, PNS Gol IV/C keatas, Perwira tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Narasumber Kelas C = Narasumber Non PNS yang disetarakan dengan PNS gol III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri.</p>
47.	<p><b>Indeks Konsumsi untuk Kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor</b> Satuan biaya konsumsi untuk kegiatan rapat/sosialisasi/konsinyasi yang bersifat koordinatif dan diselenggarakan diluar kantor, dimana didalamnya sudah termasuk 1 (satu) kali makan dan 1 (satu) kali snack.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-32-

**Catatan Umum**

Satuan biaya yang tercantum dalam PMK ini sudah memperhitungkan unsur pajak kecuali pada :

- A. Diklat Pimpinan/Struktural
- B. Latihan Prajabatan
- C. Pengadaan Bahan Makanan (yaitu khusus untuk bahan makanan non olahan/non pabrikan)
- D. Pengertian Istilah :

- OJ = Orang/Jam
- OH = Orang/Hari
- OB = Orang/Bulan
- OT = Orang/Tahun
- OP = Orang/Paket
- OK = Orang/Kegiatan
- OR = Orang/Responden
- Oter = Orang/Terbit

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

NIP. 060041107

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 terdiri dari satuan biaya masukan dan/atau satuan biaya keluaran.

Pasal 4

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2008  
MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

[Lampiran .....](#)